



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi *Human*  
*Trafficking* di India**

Skripsi

Oleh

Windy Citra Chinta L.

2013330087

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi *Human*  
*Trafficking* di India**

Skripsi

Oleh

Windy Citra Chinta L.

2013330087

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



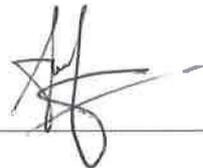
## Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Windy Citra Chinta L.  
Nomor Pokok : 2013330087  
Judul : Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi *Human Trafficking*  
di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 22 Desember 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

### Tim Penguji

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Albert Triwibowo, S.IP., MA.

: 

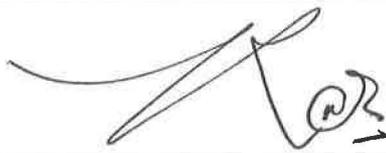
### Sekretaris

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

### Anggota

Dr. Paulus Yohanes Nur Indri

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Windy Citra Chinta L.  
NPM : 2013330087  
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi *Human Trafficking* di India

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Desember 2017



Windy Citra Chinta L.

## ABSTRAK

Nama : Windy Citra Chinta L.  
NPM : 2013330087  
Judul : Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi *Human Trafficking* di India

---

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah utama di India. Gabungan berbagai faktor seperti kemiskinan, buta huruf, rendahnya posisi perempuan di mata sosial masyarakat hingga perbatasan negara turut menambah kompleksnya pengentasan masalah perdagangan manusia di India. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah India mengatasi perdagangan manusia dengan menindaklanjuti faktor-faktor penarik dan pendorong terjadinya perdagangan manusia di India.

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bagian dimana bagian pertama berisi latar belakang, identifikasi masalah, kajian literatur dan kerangka pemikiran penulis. Bagian kedua akan menjelaskan latar belakang India dari segi sosial dan ekonomi, kemiskinan, serta perdagangan manusia serta faktor penarik dan pendorongnya. Bagian ketiga akan menjelaskan mengenai berbagai skema dan terhadap penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah utama pemerintah India dalam mengatasi perdagangan manusia adalah melalui pembentukan skema untuk memberantas kemiskinan sebagai akar utama perdagangan manusia di India. Langkah tersebut dilaksanakan baik melalui skema pendidikan, skema bantuan ekonomi, maupun skema pemberdayaan perempuan. Disamping itu, berbagai undang-undang dan peraturan juga dibetuk untuk yang melindungi korban dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Pemerintah juga melaksanakan berbagai bentuk kerjasama internasional. Salah satunya adalah perjanjian untuk menguatkan penjagaan perbatasan antarnegara.

Kata Kunci : Perdagangan manusia, India, Pemerintah, skema, peraturan, kemiskinan.

## **ABSTRACT**

Name : Windy Citra Chinta L.  
NPM : 2013330087  
Title : Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi Human Trafficking di  
India

---

*Human trafficking is one of the main problems in India. The combination of many factors such as poverty, illiteracy, the low position of women in the social sphere of society to state borders also add to the complexity of alleviating the human trafficking issue in India. This study aims to examine how the Indian government overcome the push and pull factors regarding to human trafficking in India.*

*The study will be divided into four sections where the first part contains background, problem identification, literature review and the author's frame of mind. The second part will explain India's social and economic background, poverty, and human trafficking as well as its pull and push factors. The third section will explain various schemes and regulations created by the Indian government, and the last part contains the conclusions on the research.*

*This study shows that the main step of the Indian government in tackling human trafficking is through the establishment of numerous schemes in order to eradicate poverty as the main root of human trafficking in India. The act was implemented through educational schemes, economic aid schemes, and women's empowerment schemes. The government also established various laws and regulations that were meant to protect the victims of human trafficking and to punish the traffickers. Some international cooperation was carried on. One of the main cooperation was strengthening the guarding line of each state borders.*

*Keywords: Human trafficking, India, Government, schemes, Regulations, Poverty*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan karena telah melimpahkan hikmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah India dalam Mengatasi *Human Trafficking* di India”. Skripsi ini pun tidak akan dapat terselesaikan apabila tidak ada bantuan secara material dan moral dari orangtua, dosen pembimbing, rekan-rekan seperjuangan, dan narasumber.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kelulusan pada jenjang strata satu untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Ke depannya, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap ranah ilmu pengetahuan terkait. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, selamat membaca!

Bandung, 14 Desember 2017

**Windy Citra Chinta L.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.2.3 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metode Penelitian .....	18
1.7 Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II INDIA DAN MASALAH <i>HUMAN TRAFFICKING</i></b> .....	20
2.1 Latar Belakang India .....	20
2.1.1 India Secara Geografis .....	21
2.1.2 Sosial India .....	22
2.1.3 Ekonomi India .....	23
2.1.3.1 Kemiskinan di India .....	26
2.2 <i>Human Trafficking</i> di India .....	32
2.2.1 Faktor Pendorong .....	37
2.2.2 Faktor Penarik .....	40

<b>BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI <i>HUMAN TRAFFICKING</i></b> .....	44
3.1 Berbagai Aturan dan Program Terkait dengan Pendorong dan Penarik Praktik Perdagangan Manusia.....	44
3.1.1 Berbagai Kebijakan Pemerintah India dalam Mengatasi Faktor Pendorong Terjadinya <i>Human Trafficking</i> .....	46
3.1.1.1 Kemiskinan .....	46
3.1.1.2 Pendidikan .....	50
3.1.2 Berbagai Peraturan dan Kebijakan Pemerintah India dalam Mengatasi Faktor Penarik Terjadinya <i>Human Trafficking</i> .....	54
3.1.2.1 Bantuan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan .....	54
3.1.2.2 Lapangan Pekerjaan di Kawasan Rural .....	57
3.1.2.3 Perbatasan Program Keikutsertaan Warga dalam Mengawasi Perbatasan .....	61
3.2 Kebijakan dan Program Pemerintah India Terhadap Pelaku dan Korban <i>Human Trafficking</i> .....	62
3.2.1 Pelaku <i>Human Trafficking</i> .....	62
3.2.2 Korban <i>Human Trafficking</i> .....	69
3.3 Berbagai Aktor yang Terlibat dalam Upaya Pemerintah India untuk Mengatasi <i>Human Trafficking</i> .....	71
3.4 Keterlibatan Pemerintah India dalam Berbagai Konvensi Internasional dalam Rangka Mengatasi <i>Human Trafficking</i> .....	73
3.5 Kerjasama India dengan Negara Lain .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>State-wise &amp; Category-wise Cases of Human Trafficking</i> .....	35
Tabel 3.1 Prinsip Kebijakan Negara India .....	46
Tabel 3.2 Legislasi India .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Geografis Negara India .....	22
Gambar 2.2 <i>Change in Employment Share</i> .....	24
Gambar 2.3 <i>GDP Per Capita of India in 1990</i> .....	25
Gambar 2.4 <i>Regional Share of The World's Extreme Poor Population</i> .....	33
Gambar 2.5 <i>Trafficking in India</i> .....	35

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada zaman globalisasi khususnya pada bidang komunikasi dan transportasi telah menyebabkan intensitas perdagangan internasional semakin meningkat. Kemudahan bertransaksi dari seluruh belahan dunia seakan meyakinkan kita bahwa tidak ada permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar selama sumber dayanya masih tersedia. Akibatnya, berbagai barang dan jasa yang awalnya hanya dapat diperdagangkan di pasar lokal kini dapat memasuki pasar internasional. Arus perdagangan yang semakin deras juga memunculkan aktor-aktor baru dan non-negara dalam lingkungan pasar internasional. Di satu sisi, hal ini tentu membantu menggerakkan roda perekonomian negara. Namun di sisi lain, hal ini juga dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang mengambil keuntungan dengan melakukan perdagangan ilegal.

*Human trafficking* adalah satu dari berbagai perdagangan ilegal yang semakin marak sejak kemajuan teknologi transportasi. Sebagai bentuk perbudakan di zaman modern, perdagangan manusia termasuk cukup susah untuk dideteksi. Tak heran, perdagangan ini meraih peringkat ketiga dalam kategori bisnis yang paling menguntungkan.<sup>1</sup> Bisnis ilegal ini merambah di hampir semua negara, baik negara maju maupun negara yang masih

---

<sup>1</sup> Childline India Foundation, *Child Protection & Child Rights*, <http://www.childlineindia.org.in/child-trafficking-india.htm>, Diakses pada 15 Oktober 2016

berkembang. Namun umumnya, masalah perdagangan manusia lebih memberatkan apabila terjadi di negara berkembang.

India adalah sebuah negara berkembang yang terletak di kawasan Asia Selatan. Dalam bidang perkembangan teknologi dan infrastruktur, India termasuk dalam jajaran negara-negara yang paling cepat berkembang di dunia. Namun disaat yang bersamaan, India juga menjadi negara dengan populasi penduduk miskin terbesar di Asia Selatan. Sekitar 32,7% populasi rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Bank dunia bahkan melaporkan bahwa sekitar 68,7% dari rakyat miskin India hidup dengan pendapatan dibawah US\$2 per hari.<sup>2</sup>

GDP India terus meningkat seiring waktu, namun peningkatan tersebut masih belum cukup untuk menutupi kemiskinan dari berbagai daerah.<sup>3</sup> Selain itu, jumlah kemiskinan yang besar terlanjur menyebabkan ketimpangan dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat India. Ketimpangan besar ini tentu memperlambat laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Akibatnya, angka kemiskinan semakin meningkat.

Rakyat miskin tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki penghasilan yang cukup, dan pemerintahan India yang korup membuat banyak penduduk miskin tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup dan akhirnya terlibat dalam dunia perdagangan manusia. Sebagian dari mereka masuk atas

---

<sup>2</sup> Kaur, Ramandeep, *Why India is Still a Poor Country?* <http://www.mapsofindia.com/my-india/society/why-india-is-still-a-poor-nation>, Diakses pada 15 Oktober 2016

<sup>3</sup> Ajaz, Taufeeq, *The Reality of India's Rising GDP Numbers*, <http://thewire.in/22519/the-reality-of-indias-rising-gdp-numbers/> Diakses pada 15 Oktober 2016

keinginan sendiri demi memenuhi kebutuhan; sedangkan sisanya adalah korban iming-iming pekerjaan di kota besar.<sup>4</sup>

Perdagangan manusia, telah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di India. Sekitar 378 dari 593 distrik di India telah dipengaruhi oleh perdagangan manusia. Diperkirakan bahwa 90 persen dari perdagangan manusia di India dilakukan antar wilayah India, dengan korban perdagangan sebagian besar digunakan untuk tenaga kerja paksa.<sup>5</sup>

Anak-anak dieksploitasi dengan berbagai cara, diantaranya adalah dipekerjakan di pabrik, menjadi pembantu rumah tangga, dan pengemis. Sementara itu, kaum perempuan biasanya sangat rentan terhadap perdagangan untuk tujuan kawin paksa dan eksploitasi seksual komersial. *The 2013 Global Slavery Index* menemukan bahwa hampir setengah dari 30 juta “budak modern” di dunia ternyata berasal dari India.<sup>6</sup>

Dengan jumlah yang sedemikian besarnya, tidak heran bila perdagangan manusia di India telah memasuki status *urgent*. Namun, keterkaitannya sangat kompleks dengan berbagai masalah lain di India. Hal ini menyebabkan perdagangan manusia di India tidak mudah untuk diperangi. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan tindakan untuk memberantas akar terbesar perdagangan manusia di India, yaitu kemiskinan.

---

<sup>4</sup> *Human Trafficking in India*, <http://borgenproject.org/human-trafficking-india/>, Diakses pada 16 Oktober 2016

<sup>5</sup> Nizmi, Yuznarida, *Regionalisme dan Globalisme: kajian tematik: (perdagangan orang di berbagai belahan dunia)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau: Pekanbaru, hlm. 126

<sup>6</sup> Sur, Priyali, <http://www.womenundersiegeproject.org/blog/entry/silent-slaves-stories-of-human-trafficking-in-india>, Diakses pada 16 Oktober 2016

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Pemahaman mengenai keamanan mengalami perluasan pasca perang dingin. Pada awalnya, aspek keamanan dikonotasikan secara sempit sebagai konflik atau perang antar negara. Namun, isu yang dihadapi oleh negara semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah *Transnational Crime* yang kemudian diidentifikasi sebagai ancaman keamanan dalam bentuk baru. Dari situ, negara mulai menyadari bahwa kesejahteraan dan rasa aman individu adalah suatu hal penting yang juga harus diperhatikan.<sup>7</sup> Aspek keamanan akhirnya melebar ke berbagai masalah sosial seperti politik, ekonomi, lingkungan hidup, bahkan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Salah satu bentuk *transnational crime* tersebut adalah *human trafficking*.

*Human trafficking* adalah kejahatan terorganisasi terbesar ketiga setelah senjata dan narkoba.<sup>9</sup> Menurut data yang dikumpulkan oleh *The Global Slavery Index* dari 167 negara pada tahun 2014, terdapat 45,8 juta manusia yang menjadi korban dalam perdagangan manusia dalam bentuk apapun,<sup>10</sup> dan hampir 40% dari populasi tersebut

---

<sup>7</sup> Philips Jusario V. (2002). *Transnational Organized Crime : Isu dan Permasalahannya* Dalam analisis CSIS Isu-isu non-tradisional : Bentuk Baru Ancaman Keamanan hal.46

<sup>8</sup> Dalby, S., (1992), “*Security, Modernity, Ecology : The Dilemmas of Post Cold War Security Discourse*”, *Alternatives* Vol. 17 : Halaman 102-103.

<sup>9</sup> “*UNODC report on human trafficking exposes modern form of slavery*”, <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html> diakses pada 17 Mei 2017

<sup>10</sup> “*The Global Slavery Index 2016*”, <https://www.globalslaveryindex.org/findings/>

(sekitar 14,3 juta orang) berada di India.<sup>11</sup> Selain itu, ternyata warga yang menjadi korban *human trafficking* tidak hanya berasal dari India. Banyak juga korban yang berasal dari negara tetangganya yaitu Bangladesh dan Nepal.<sup>12</sup>

Kemiskinan adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya praktek *human trafficking*. Selama masa penjajahan oleh Inggris pada abad ke 18, India diharuskan mengikuti peraturan kolonialisme dimana investasi dan perdagangan keluar negeri dilarang. Hal ini tentu menjadi halangan untuk kemajuan perekonomian India. Setelah merdeka di tahun 1947, dibawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru, pemerintah India sangat fokus terhadap membangun citra India di ranah internasional sementara sektor rural dan perekonomian di India hampir diabaikan sepenuhnya. Saat itu strategi sosialisme juga diterapkan oleh pemerintah. Sektor ekonomipun tidak dapat berkembang banyak karena kontrol pemerintah.<sup>13</sup> Penduduk miskin akhirnya semakin tertinggal, tanpa pendidikan dan kehidupan yang layak, dan rentan terhadap *human trafficking*.

Perdagangan manusia timbul akibat tingginya permintaan pasar internasional akan buruh murah dan semakin maraknya industri wisata

---

<sup>11</sup> "INDIA TOPS GLOBAL SLAVERY INDEX WITH OVER 14 MILLION PEOPLE ENSLAVED", <http://www.newsweek.com/india-tops-global-slavery-index-over-14-million-people-enslaved-284950>

<sup>12</sup> *Cooperation to Combat Cross Border Trafficking: India-Nepal-Bangladeh*, <http://wiscomp.org/Publications/38%20-%20Perspectives%2031%20-%20Cooperation%20to%20Combat%20Cross%20Border%20Trafficking%20India-Nepal-Bangladesh.pdf>

<sup>13</sup> *Why does India have so much poverty?* <https://www.quora.com/Why-does-India-have-so-much-poverty>

seks di India.<sup>14</sup> Untuk memenuhi permintaan ini, para pelaku perdagangan manusia mengiming-imingi calon korbannya dengan upah yang besar dan kehidupan yang layak bila bersedia dipekerjakan di kota. Keluarga miskin yang memiliki banyak anak biasanya bersedia untuk mengirimkan beberapa anaknya untuk bekerja jauh dari rumah demi memberi pemasukan tambahan, namun ternyata anak-anak ini diberi upah yang sangat kecil, dengan pekerjaan yang berat dan sedikit kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, tanpa pelatihan dan tanpa pendidikan sehingga pemasukan tambahan yang dibutuhkan tersebut tidak didapatkan.<sup>15</sup>

Ada berbagai faktor pendorong yang membuat korban *human trafficking* bersedia untuk pergi bekerja jauh seperti terbatasnya lapangan kerja, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah asal.<sup>16</sup> Hal ini juga berlaku bagi korban dari Bangladesh dan Nepal yang diperdagangkan ke India. Hampir 20.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan di India setiap tahunnya, menjadikan isu ini sebagai isu penting yang harus segera diselesaikan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *HUMAN TRAFFICKING IN SOUTHEAST ASIA: CAUSES AND POLICY IMPLICATIONS*, <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a501444.pdf>

<sup>15</sup> *Human trafficking In India: An analysis*, <http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue6/PartC/2-6-41-698.pdf>

<sup>16</sup> *Woman Trafficking in India, an Anthropological View*, [file:///C:/Users/user/Downloads/Women\\_Trafficking\\_In\\_India\\_An\\_Anthropological\\_View.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Women_Trafficking_In_India_An_Anthropological_View.pdf), hal.7

<sup>17</sup> *National Crime Records Bureau data, 2015: Slight dip in rape, crime against women*, <http://indianexpress.com/article/explained/national-crime-records-bureau-data-2015-slight-dip-in-rape-crime-against-women-3004980/>

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian mengenai masalah *human trafficking* di India dapat dipaparkan secara detail dan fokus, pembatasan masalah akan digunakan dalam menyusun penelitian ini.

Penelitian akan lebih difokuskan terhadap upaya domestik/dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah India untuk mengurangi faktor kemiskinan dalam rangka mengatasi *human trafficking*. Adapun lebih dari itu, penulis juga akan meyertakan upaya kerjasama pemerintah India dengan negara tetangganya yang warganya banyak menjadi korban *human trafficking* di India, yakni Bangladesh dan Nepal, serta beberapa konvensi internasional yang turut berkontribusi dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan anti-*human trafficking* yang dibentuk oleh pemerintah India.

Untuk menjaga alur pembahasan agar tidak terlalu luas, pembahasan akan dibatasi dalam rentang tahun 2009-2015. Rentang waktu ini dipilih oleh penulis karena 2009 adalah tahun yang bertepatan dengan dimulainya ratifikasi Protokol Palermo oleh India, dan 2015 adalah waktu setelah India meratifikasi Protokol Palermo hingga saat ini. Dalam kurun waktu 6 tahun tersebut terdapat berbagai macam kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah India sebagai usaha mengatasi perdagangan manusia di India.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

**Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi *human trafficking* di India?**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan riset dan menggambarkan berbagai upaya pemerintah India dalam mengurangi *human trafficking* di negaranya.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dibuat sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk kontribusi penulis terhadap koleksi kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.4 Kajian Literatur**

a. *Human Trafficking: The Stakeholders' Perspective*, oleh Veerendra Mishra

Literatur ini memaparkan berbagai macam isu dan perspektif beragam penguasa terhadap perdagangan manusia. Pada dasarnya seluruh perspektif itu isinya sama: berusaha untuk memperkuat usaha

dalam memerangi perdagangan manusia. Pada bab pertama, jurnal ini mengulas bentuk awal dari perdagangan manusia khususnya pada perempuan yaitu pernikahan paksa. Perempuan dipaksa menikah agar keluarganya mendapat imbalan dari pengantin pria. Pada bab kedua, ulasan difokuskan pada berbagai bentuk perdagangan manusia pada anak: perdagangan berkedok adopsi, perdagangan untuk eksploitasi seksual, dan lain-lain.

Literatur ini juga memuat banyak kisah dari berbagai organisasi kemanusiaan yang berhasil menyelamatkan anak-anak dari perdagangan ini.

Bab ketiga berisi perspektif terhadap perdagangan manusia dari luar India. Kasus-kasus perdagangan dari berbagai negara seperti Eropa Timur, Timur Tengah, Nepal, Bangladesh, dan lain-lain turut dibahas. Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa jenis-jenis perdagangan manusia yang marak di tiap negara sangat berbeda.

Di Eropa Timur misalnya, perdagangan manusia yang banyak terjadi adalah yang berkedok adopsi, sedangkan di Nepal, kebanyakan anak-anak yang diperdagangkan dipaksa bekerja di sirkus.

b. *Human Trafficking in India: A Study*, oleh R. H. Waghmode, J. L.

Kalyan dan S. S. Angadi

Jurnal ini berisi analisa terhadap masalah dan perspektif dalam kasus perdagangan internasional, aspek legal dalam perdagangan manusia, peran hukum dan kesadaran masyarakat di India selama tahun 2014. Dalam pandangannya, jurnal ini membagi faktor perdagangan

menjadi dua: faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorongnya antara lain adalah kemiskinan, tidak adanya pendidikan, kelebihan populasi akibat banyaknya jumlah anak pada satu keluarga, serta rendahnya status perempuan di India. Faktor penarik antara lain adalah iming-iming pekerjaan di kota besar, gaji yang besar, bahkan adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa berhubungan seks dengan perempuan perawan dapat menyembuhkan HIV/AIDS.

Sub-bab selanjutnya menjelaskan latar belakang singkat mengenai skenario perdagangan manusia di India, tuntutan oleh berbagai organisasi internasional, dan usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya melalui sejumlah kebijakan dan peraturan. Jurnal ini akhirnya ditutup dengan opini peneliti mengenai perdagangan internasional di India, saran, dan kesimpulan.

*c. Perspectives on Poverty in India: Stylized Facts from Survey Data*, oleh World Bank

Diukur dari segi konsumsi, kemajuan India dalam mengurangi kemiskinan tergolong cukup stabil. Sejak tahun 1990, banyak sektor yang turut menyumbang kemajuan ekonomi, diantaranya adalah pertumbuhan sektor pertanian. Sejak 1970 sampai awal 1990an, sektor ini telah memberi kontribusi besar terhadap pengurangan kemiskinan. Sejak tahun 1990an pula, pertumbuhan ekonomi di pedesaan telah berhasil mengurangi kemiskinan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> The World Bank, Executive Summary in *Perspectives on Poverty in India: Stylized Facts from Survey Data*, 2011

Namun terdapat bukti-bukti baru yang menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan pedesaan dengan kemiskinan ternyata lebih kompleks. Hampir sepertiga penduduk miskin India bertempat di pedesaan, yang berarti upaya pemberantasan kemiskinan harus digerakkan dengan porsi yang lebih besar di daerah pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank juga menemukan bahwa pergantian fokus negara dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berkurangnya kemiskinan di India. Hingga kini, masih banyak perdebatan lokal mengenai sektor apa yang dianggap layak untuk menggantikan dominasi pertanian. Pertanian adalah sektor andalan yang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya perempuan dan orang lanjut usia, sehingga tidak dapat diganti begitu saja. Namun, sektor non-pertanian juga termasuk penting dalam memberantas kemiskinan di India.

Penelitian ini juga berpandangan bahwa ketidaksamaan karena latar belakang kasta, suku, dan jenis kelamin adalah sebuah faktor besar penyebab kemiskinan, sehingga perbaikan terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya dari segi sosial adalah kunci penting bagi pemberantasan kemiskinan di India.

Ketiga kajian literatur ini dipilih karena dapat membantu penulis melihat gambaran kemiskinan dan isu *human trafficking* di India dengan lebih detail dan memberi gambaran kerangka pembahasan untuk penelitian ini.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan upaya sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.<sup>19</sup> Poerwadarminta (1991 : 574), mendefinisikan upaya sebagai usaha untuk menyampaikan akal, maksud dan ikhtisar, segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Dari beberapa pengertian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian upaya pemerintah India berarti suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi masalah, yang dalam tulisan ini berarti masalah *human trafficking* di India.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan menjabarkan rangkaian teori yang akan disusun sebagai pondasi kerangka argumentasi penulis. Dengan begitu, penelitian ilmiah ini dapat disebut terjamin dalam: jawaban atau kesimpulan, karena seluruh proses analisa telah teruji melalui proses keilmuan; pernyataan atau ilmu pengetahuan yang ditarik sebagai hasil penelitian ini bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun.<sup>20</sup>

Para realis berpendapat bahwa aktor lain selain dari negara tidak memiliki pengaruh maupun peran yang lebih penting dari negara itu sendiri. Pandangan ini juga menyatakan bahwa yang dapat memberi jaminan atas

---

<sup>19</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada 2 September 2017

<sup>20</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984) hal.323

pemecahan masalah yang berkaitan dengan tatanan dan keamanan hanyalah negara, karena pemerintah memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya sendiri sehingga tiap individu yang menjadi warga negara tersebut tidak perlu mengkhawatirkan keamanan mereka sendiri. Unsur ini memandang kedaulatan suatu negara sebagai hal yang terpenting untuk melindungi keamanannya.<sup>21</sup>

Konsep realis mengenai keamanan negara berkembang menjadi *human security* dan kemudian dipromosikan secara masif oleh UNDP (United Nations Development Programme).<sup>22</sup> Berkat meluasnya konsep ini, semenjak berakhirnya Perang Dingin maka keamanan juga diasosiasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hal-hal lain yang bersifat individu seperti ancaman kesehatan, kelaparan, pengangguran, kejahatan, konflik sosial, represi politik, dan bahaya lingkungan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan teori sebelumnya, transnasionalisme juga akan digunakan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi *human trafficking* di India. Transnasionalisme adalah gagasan bahwa ada hubungan yang semakin meningkat antara masyarakat di seluruh dunia, baik dalam masalah ekonomi, politik, dan

---

<sup>21</sup>Dunne, Tim & Schmidt, Brian C., 2001. Realism. In: Baylis, John & Smith, Steve, eds. *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press, pp.141-155, dari *TEORI DAN PERSPEKTIF REALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL (week 2)*, [http://luqman-saputro-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-94233-SOH201-TEORI%20DAN%20PERSPEKTIF%20REALISME%20DALAM%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20\(week%202\).html](http://luqman-saputro-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94233-SOH201-TEORI%20DAN%20PERSPEKTIF%20REALISME%20DALAM%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL%20(week%202).html)

<sup>22</sup> Fiotti, Paul R, Sauppi, Mark F, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, 1990, Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan Inc

<sup>23</sup> Koledziej, Edward A. 2007. 'Testing security theories: explaining the rise and the demise of the Cold War', dalam *Security and the International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 127-259, dari *Pendekatan dalam Keamanan dan Perdamaian: Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme* [http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-170455-SOH302%20\(Politik%20dan%20Keamanan%20Internasional\)-Pendekatan%20dalam%20Keamanan%20dan%20Perdamaian:%20Realisme,%20Liberalisme,%20dan%20Konstruktivisme.html](http://tara-wardhani-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-170455-SOH302%20(Politik%20dan%20Keamanan%20Internasional)-Pendekatan%20dalam%20Keamanan%20dan%20Perdamaian:%20Realisme,%20Liberalisme,%20dan%20Konstruktivisme.html)

budaya (Vertovec, ND). Dengan demikian, teori transnasionalisme dapat dipahami sebagai kemunculan dan analisis mengenai "aktivitas transnasional karena adanya isu sosial serta faktor politik dan ekonomi yang mengkondisikan penciptaannya" (Vertovec, ND: 3). Portes, Guarnizo & Landolt (1999) menjelaskan bahwa konsep transnasionalisme memerlukan kontak reguler dan berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk implementasinya (219).<sup>24</sup> Teori ini merupakan gagasan tentang organisasi sosial dan pengelompokan sosial yang terhubung di seluruh dan di berbagai batas fisik, dan bagaimana jaringan ini dapat mempengaruhi individu dan kelompok (atau masyarakat) (Wiltshire, 2001; di Vertovec, 2004).<sup>25</sup> Dalam konteks perdagangan manusia pada penelitian ini, transnasionalisme dapat dijadikan perspektif mengenai hubungan antarnegara PBB maupun India dan negara-negara tetangganya yang tetap berlangsung berlandaskan protokol konvensi maupun kerjasama yang terus menerus diperbaharui demi mengatasi isu bersama yakni perdagangan manusia.

Konsep globalisme juga akan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa ahli seperti Smith dan Baylis dalam bukunya berusaha mendefinisikan globalisasi sebagai proses meningkatnya keterikatan antar masyarakat dunia.<sup>26</sup> Ini berarti, masalah apapun yang terjadi pada negara manapun, dapat mempengaruhi masyarakat pada negara lainnya.<sup>27</sup> Hal ini tentu sejalan

---

<sup>24</sup> seperti tertulis di "What is Transnationalism?", <http://internationalrelations.org/transnationalism/>, diakses pada 10 November 2017

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> J. A. Scholte, *The Globalization of World Politics*. in J. Baylis & S. Smith, *The Globalization of World Politics* (Oxford University Press) hal.13-34

<sup>27</sup> Smith S. & J. Baylis (2001). Introduction. In Smith S. & J. Baylis, *The Globalization of World Politics* (Oxford University Press) hal. 1-12

dengan permasalahan *human trafficking* yang terjadi di India, dimana warga Bangladesh dan Nepal juga turut terpengaruh menjadi korban. Tidak hanya itu, globalisasi juga telah memunculkan berbagai isu internasional baru yang umumnya mengenai lingkungan dan hak asasi manusia. Karena globalisasi, dunia kini seakan tidak dikuasai hanya oleh negara.<sup>28</sup> Berbagai aktor non-negara berkelas internasional seperti korporasi, organisasi, dan jaringan non-pemerintah juga memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat dunia.<sup>29</sup>

*Human trafficking* dalam Pasal 3 dari Protokol Palermo PBB didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan memakai ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>30</sup>

Mayoritas perdagangan manusia terjadi di negara-negara berkembang yang masih berurusan dengan kemiskinan dan keterbatasan pendidikan sebagai masalah utamanya.<sup>31</sup> Menurut Jeffrey Sachs, terdapat 3 kategori kemiskinan yaitu kemiskinan oleh keadaan, dimana orang tidak memiliki uang dikarenakan oleh berbagai keadaan sekitarnya yang tidak dapat dikontrol seperti perang, wabah penyakit, dan lain-lain. Karena

---

<sup>28</sup> Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori (1)* (PT Refika Aditama, Bandung) 2006

<sup>29</sup> M. Barnett & K. Sikkink, (2008), *From International Relations to Global Society*, in C. Reus-Smit & D. Snidal, *The Oxford Handbook of International Relations* (Oxford University Press) hal. 62-83

<sup>30</sup> Elizabeth Ivana Yuko Theories, 2009, *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

<sup>31</sup> *Human Trafficking FAQs*, <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html>

ketidakmampuan menghadapi berbagai keadaan inilah, orang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan atau yang disebut sebagai *poverty trap*. Kemudian ada juga kemiskinan karena uang, dan kemiskinan karena pilihan, atau kemiskinan karena kebiasaan buruk yang tidak dikontrol.<sup>32</sup> Keberadaan pasar *human trafficking* tidak serta-merta memunculkan banyak korban perdagangan manusia. Dalam kemiskinan, seringkali keluarga memanfaatkan anak perempuannya untuk menopang kebutuhan keluarga, antara lain dengan mengirim anak perempuannya untuk bekerja di buruh maupun sektor hiburan. Hal ini dimanfaatkan oleh pasar perdagangan manusia untuk menarik korban untuk bekerja di sektor tersebut. Selain itu, karena kurangnya kesadaran korban mengenai praktik perdagangan manusia, iming-iming pendapatan yang besar dengan mudah mendorong para korban untuk bekerja pada calo-calo perdagangan tersebut. Praktik ini semakin mudah dilakukan karena lemahnya pengawasan hukum dan pemerintah. Hal ini tetap berlangsung karena para korban beranggapan bahwa kondisi seperti ini masih lebih baik daripada ketidakpastian di daerah asalnya.

Pada tahun 1998, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan pilihan dan kesempatan, ketiadaan kemampuan dasar untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, ketidakmampuan memberi makan dan pakaian sebuah keluarga, tidak memiliki sekolah atau klinik untuk didatangi, tidak memiliki tanah untuk menumbuhkan makanan atau untuk dikerjakan untuk bertahan hidup, tidak memiliki akses kredit, serta ketidakamanan, ketidakberdayaan dan pengucilan individu., rumah tangga

---

<sup>32</sup> Jeffrey D. Sachs, *The End of Poverty*

dan masyarakat yang menghasilkan kerentanan terhadap kekerasan, dan itu Sering menyiratkan hidup di lingkungan marginal atau rapuh, tanpa akses ke air bersih atau sanitasi.<sup>33</sup> Bila definisi ini diterapkan di India, maka sekitar 30% masyarakat India (sekitar 224 juta orang) tergolong dalam kategori miskin.<sup>34</sup> Kemiskinan dapat membebani kemajuan negara dan membatasi negara untuk mencapai kepentingannya, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menanggulangnya.

Setiap negara memiliki keterbatasan masing-masing. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya, teknologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan dalam lingkup hak asasi manusia dan keamanan individu secara maksimal, negara memerlukan bantuan dari aktor-aktor lain. Kerjasama tersebut timbul dari adanya komitmen masing-masing negara terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama adalah upaya pemenuhan kepentingan pribadi, yang menguntungkan kedua belah pihak, dan dapat diperoleh dengan saling mendukung dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, kepentingan negara India dengan negara-negara yang diajak bekerja sama adalah untuk mengurangi kasus *human trafficking*.

---

<sup>33</sup> "Indicators of Poverty & Hunger", [http://www.un.org/esa/socdev/nyin/documents/ydiDavidGordon\\_poverty.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/nyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf) diakses pada 17 Mei 2017

<sup>34</sup> "India has highest number of people living below poverty line: World Bank", <http://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-has-highest-number-of-people-living-below-poverty-line-world-bank/story/238085.html>

<sup>35</sup> Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories*. New York : Harper and Row Publisher.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah metode deskriptif. Menurut M. Rosyid dalam bukunya yang berjudul *Metodelogi Penelitian Hubungan Internasional*, metode deksriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan berbagai fakta hubungan fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual.<sup>36</sup> Dengan kata lain, metode ini juga dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelidikan masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian secara apa adanya, sesuai dengan fakta yang tersedia.<sup>37</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder dari buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk mengungkap konsep dan obyek penelitian. Selain itu, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang ada melalui berbagai data yang telah dikumpulkan. Berbagai data ini kemudian diolah berdasarkan teori dan konsep yang dipilih oleh penulis.<sup>38</sup> Data yang akan dianalisa oleh penulis adalah data yang berasal dari penelusuran literatur dari berbagai sumber dan pengumpulan informasi dari berbagai materi yang penulis temukan di perpustakaan dan internet. Data dikumpulkan melalui studi berbagai dokumen yang ditemukan di

---

<sup>36</sup> Mohammad Rosyid, *Metodelogi Penelitian Hubungan Internasional*,

<sup>37</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4<sup>th</sup> Edition* (California: Sage Publications, 2014) hal. 239

<sup>38</sup> Husaini Usman dan Purnomo Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (PT. Bumi Aksara) hal.4

perpustakaan online seperti karya dosen, karya mahasiswa, dokumen, dan lain-lain.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian untuk skripsi ini akan diulas dalam 5 bab. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan diteliti, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian.

Bab kedua akan menggambarkan masalah *human trafficking* di India dengan penekanan pada faktor pendorong dan penarik.

Bab tiga akan menjelaskan berbagai usaha pemerintah dalam mengurangi praktek *human trafficking* di India melalui berbagai kebijakan dan kerjasama dengan aktor negara maupun aktor non-negara.

Bab keempat berisi kesimpulan dari penelitian ini.